



Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Telsa Paputungan^{1*}, Irawaty Igrisa², Rahmatia Pakaya³

¹⁻³Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: telsapaputungan6@gmail.com¹, irawatyigrisa17@ung.ac.id², Rahmatia_pakaya@ung.ac.id³

*Penulis Korespondensi: telsapaputungan6@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of the staple food assistance program in Tapadaka Satu Village, Dumoga Tenggara Sub-district, Bolaang Mongondow Regency, Sulawesi Utara Province. The main sub-focus of this research includes five aspects of effectiveness measurement proposed by Sutrisno (2018), namely: (1) program understanding, (2) target accuracy, (3) timeliness, (4) achievement of objectives, and (5) real change. This research employs a qualitative, descriptive research approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of the staple food assistance program in Tapadaka Satu Village has not been fully effective. In terms of program understanding, socialization has been conducted by the Social Affairs Office and village government, but some beneficiary families still do not fully understand the program's mechanisms, rights, and obligations. In target accuracy, discrepancies in beneficiary data persist due to changing socio-economic conditions and the suboptimal updating of DTSEN data. In timeliness, assistance distribution generally follows the mechanism, but delays in fund disbursement still occur. In achieving objectives, the program helps reduce beneficiary families' food expenditure burden, although delays affect results. Lastly, real change remains limited, short-term, and has not significantly improved community welfare.*

Keywords: *Community Welfare; Effectiveness; Staple Food Program; Tapadaka Satu Village; Target Accuracy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Sub fokus utama penelitian ini meliputi lima aspek pengukuran efektivitas dari Sutrisno (2018), yang meliputi : (1) Pemahaman Program, (2) Ketepatan Sasaran, (3) Ketepatan Waktu, (4) Tercapainya Tujuan, (5) Perubahan Nyata. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu belum efektif. Pada aspek pemahaman program, sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan pemerintah desa, namun masih terdapat keluarga penerima manfaat yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme, hak, dan kewajiban dalam program. Pada aspek ketepatan sasaran, masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima akibat dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat serta proses pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum optimal. Dari aspek ketepatan waktu, penyaluran bantuan pada dasarnya mengikuti mekanisme yang ditetapkan, namun dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan pencairan, yang menyebabkan polemik baru di masyarakat. Pada aspek tercapainya tujuan, program dinilai mampu membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, namun pencapaian tujuan program juga dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan. Terakhir pada aspek perubahan nyata, dampak yang dirasakan masyarakat lebih bersifat jangka pendek dan belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

Kata kunci: Desa Tapadaka Satu; Efektivitas; Kesejahteraan Masyarakat; Ketepatan Sasaran; Program Sembako.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena nyata yang terjadi di tengah masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Keadaan ini muncul ketika individu, keluarga, atau komunitas tertentu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui program sembako. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pelaksanaan Program Sembako. Program ini merupakan bentuk pengembangan dari Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dengan tujuan memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran, sesuai jumlah, waktu, harga, kualitas, serta administrasi yang lebih baik. Seperti halnya BPNT, Program Sembako juga dirancang agar penerima manfaat memiliki kebebasan dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat pembelian bahan pangan sesuai kebutuhan mereka (Rahman & others, 2024).

Desa Tapadaka Satu merupakan salah satu desa di Kecamatan Dumoga Tenggara yang menerima manfaat dari Program Sembako, sebuah inisiatif pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pangan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Desa Tapadaka Satu tercatat sebanyak 401 jiwa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat yang menerima bantuan Program Sembako berjumlah 73 jiwa, dan bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 44 jiwa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu warga Desa Tapadaka Satu, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program Sembako. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi agar tetap terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, ketepatan sasaran masih menjadi masalah, karena ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara di sisi lain, penerima yang kurang memenuhi kriteria masih ditemukan. Ketepatan waktu penyaluran juga belum optimal, dengan adanya keterlambatan distribusi yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan sembako sesuai jadwal. Kondisi ini berdampak pada pencapaian tujuan program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Akibatnya, perubahan nyata yang diharapkan dari program ini belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan menyeluruh serta peningkatan sosialisasi agar pelaksanaan Program Sembako dapat lebih optimal dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Istilah administrasi publik dapat dimaknai sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparat negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemahaman ini pada dasarnya mencerminkan esensi dari ilmu Administrasi Publik, yang sejak awal dikembangkan dengan orientasi utama untuk memberikan pelayanan kepada publik secara luas. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sejatinya merupakan amanah dari rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya berakar dari aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat itu sendiri, (Igirisa, 2022) .

Kebijakan Publik

Menurut Syafiie dalam (Tahir, 2022) kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu respons terhadap permasalahan tertentu, yang bertujuan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah dampak negatif, sekaligus mendorong inovasi serta menciptakan perubahan positif melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah.

Efektivitas

Menurut Fremont E. Kas dalam (Ferda, Sarah, dan Marlien, 2012) Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, yakni sejauh mana rencana dapat dijalankan dan sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan didefinisikan sebagai proses, metode, atau tindakan dalam menjalankan suatu rencana atau keputusan. Pelaksanaan merupakan langkah nyata dalam merealisasikan rencana yang telah dirancang dengan matang dan terperinci. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, berbagai aspek perlu dipersiapkan, seperti sumber daya yang dibutuhkan, peralatan yang digunakan, pihak yang bertanggung jawab, lokasi pelaksanaan, serta metode yang diterapkan (Rahmadi & Wahyuni, 2021) .

Program Sembako

Program Sembako merupakan hasil pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pangan. Tujuan utama program ini adalah memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, dalam jumlah yang sesuai, tepat waktu, dengan harga yang wajar, kualitas yang terjamin, serta

dikelola secara tertib dan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Seperti halnya program Bantuan Pangan Non Tunai, program ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat dalam menentukan jenis, kualitas, harga, serta lokasi pembelian bahan pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan terkait (Pedoman Umum Sembako, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan pada lingkungan alami sebagai sumber data utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan program serta berbagai faktor yang memengaruhinya (Abdussamad, 2021). Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal, wawancara mendalam bersama informan yang merupakan pelaksana program dan masyarakat penerima program, serta studi dokumentasi yang mencakup analisis terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan tertulis, mekanisme pelaksanaan, prosedur, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan program sembako. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dilihat dari lima aspek pengukuran efektivitas menurut Sutrisno, yaitu : pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Pemahaman Program

Aspek pemahaman program dalam pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara belum terpenuhi secara optimal. Dari hasil wawancara dengan pihak dinas sosial, pendamping sosial, serta aparat pemerintah desa Tapadaka Satu, bahwa sosialisasi program sembako telah dilaksanakan dan melibatkan berbagai unsur terkait, namun pelaksanaannya cenderung bersifat awal dan belum berkelanjutan. Sosialisasi hanya dilakukan setelah penetapan nama-nama penerima manfaat dan lebih difokuskan pada penyampaian tujuan, manfaat, serta mekanisme program, baik secara langsung di kantor desa

maupun melalui media sosial. Selanjutnya hasil wawancara dengan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bahwa sebagian besar penerima memahami program sembako sebatas pada tujuan dan manfaatnya, yaitu membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, sosialisasi lanjutan secara berkala tidak lagi dilakukan, sehingga masih terdapat KPM yang kurang memahami secara menyeluruh terkait aturan, kriteria, dan mekanisme program, bahkan ada yang tidak mengikuti sosialisasi awal sehingga pemahamannya terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman program di tingkat penerima manfaat masih belum merata dan memerlukan penguatan melalui edukasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas sosial, pendamping sosial, dan aparat pemerintah Desa Tapadaka Satu, dapat disimpulkan bahwa penetapan penerima program sembako telah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kriteria desil 1 sampai 5 sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan, serta melalui tahapan verifikasi sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh kendala administrasi seperti ketidaksesuaian data NIK, keterlambatan pembaruan dan penetapan data oleh pemerintah pusat, serta adanya penerima yang secara ekonomi sudah tergolong mampu tetapi belum mengajukan pengunduran diri.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan salah satu keluarga miskin non-penerima, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan masyarakat, penyaluran program sembako di Desa Tapadaka Satu sebagian besar telah berjalan cukup tepat sasaran, namun masih terdapat warga yang secara kondisi ekonomi layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima. Faktor yang dinilai menjadi penyebab antara lain belum diperbaruinya data penerima, penggunaan data lama, keterbatasan kuota, serta mekanisme penetapan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga nama yang diusulkan oleh desa tidak selalu langsung terakomodasi (Pinontoan, 2020).

Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas sosial, pendamping sosial, serta aparat pemerintah Desa Tapadaka Satu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran program sembako sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan disalurkan melalui bank (BRI) langsung ke rekening penerima dalam empat tahap setiap tahun

dengan nominal Rp200.000 per bulan yang sering dicairkan secara rapel dua atau tiga bulan. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi keterlambatan pencairan, meskipun umumnya hanya berlangsung satu hingga dua bulan. Pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan tersebut karena proses pencairan dan kendala teknis sepenuhnya berada di tingkat pusat, sehingga daerah hanya berperan dalam pendampingan dan tidak memiliki kewenangan dalam proses penyaluran dana.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa penyaluran program sembako pada awal pelaksanaannya cenderung dilakukan setiap bulan, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi pencairan dua hingga tiga bulan sekali, bahkan dalam beberapa kasus terjadi keterlambatan hingga enam bulan. Mayoritas informan menyatakan bahwa keterlambatan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi KPM yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, sehingga mereka terpaksa mencari pinjaman, menggadaikan kartu bantuan, atau meminjam di koperasi dan warung. Meskipun terdapat sebagian kecil KPM yang tidak terlalu terdampak karena memiliki usaha atau mata pencaharian lain, secara umum keterlambatan pencairan bantuan menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu penyaluran belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga penerima manfaat.

Tercapainya Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa, dapat disimpulkan bahwa tujuan program sembako pada dasarnya telah tercapai dalam hal meringankan beban ekonomi dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Program ini dinilai memberikan dampak nyata dalam mengurangi kekhawatiran penerima terhadap kebutuhan pangan sehari-hari, meskipun belum mampu mengentaskan mereka dari kategori miskin secara menyeluruh. Namun demikian, efektivitas pencapaian tujuan program sangat bergantung pada perilaku dan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan dana bantuan sesuai peruntukannya. Masih ditemukan sebagian kecil penerima yang menggunakan bantuan untuk kebutuhan di luar pangan, sehingga diperlukan upaya edukasi, pemantauan, dan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah dan desa agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa program sembako memberikan dampak positif dan secara nyata membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya dalam pemenuhan

kebutuhan pangan sehari-hari serta mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama saat kondisi ekonomi sulit atau harga bahan pokok meningkat. Namun demikian, manfaat tersebut menjadi kurang optimal ketika terjadi keterlambatan pencairan bantuan, karena sebagian besar penerima masih sangat bergantung pada bantuan tersebut sehingga terpaksa mencari pinjaman, berhutang di warung, atau mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, meskipun program ini dinilai efektif dalam membantu kebutuhan dasar, ketepatan waktu pencairan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat.

Perubahan Nyata

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah daerah dan pemerintah desa, dapat disimpulkan bahwa Program Sembako belum memberikan perubahan nyata yang signifikan terhadap status sosial maupun kondisi ekonomi penerima secara menyeluruh, karena nominal bantuan yang terbatas hanya berfungsi sebagai bantuan tambahan untuk meringankan beban hidup. Perubahan yang dirasakan lebih bersifat terbatas, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi lebih terjamin dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, program ini dinilai efektif dalam membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, namun belum mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan atau mengubah kondisi sosial ekonomi penerima manfaat secara mendasar.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat disimpulkan bahwa program sembako memberikan perubahan yang nyata terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Sebelum menerima bantuan, sebagian penerima masih mengalami kesulitan dalam membeli beras dan lauk-pauk yang layak, bahkan harus mengonsumsi makanan seadanya. Setelah menerima bantuan, kebutuhan dasar seperti beras, ikan, sayur, hingga gas untuk memasak menjadi lebih terpenuhi, sehingga beban pengeluaran rumah tangga berkurang dan rasa khawatir terhadap ketersediaan makanan menurun. Namun demikian, perubahan tersebut hanya terbatas pada aspek pemenuhan pangan dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan, karena pekerjaan dan tingkat pendapatan penerima pada umumnya tetap tidak berubah.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bagaimana kompleksitas pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal seringkali dipengaruhi oleh lima aspek pengukuran efektivitas menurut Sutrisno.

Pemahaman Program

Pemahaman program berkaitan dengan bagaimana suatu program diterapkan agar dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dalam pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara aspek pemahaman program masih berada pada kategori cukup, namun belum optimal dan belum merata di seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemahaman penerima umumnya terbatas pada tujuan dan manfaat program dalam meringankan beban kebutuhan pangan, sementara aspek teknis seperti mekanisme penyaluran, kriteria penerima, hak dan kewajiban, serta perubahan kebijakan belum dipahami secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program dari sisi pemahaman masih dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi lanjutan, intensitas komunikasi, dan edukasi yang belum berkelanjutan (Sutrisno, 2018). Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan komunikasi dan sosialisasi yang sistematis, konsisten, dan berkesinambungan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Salamah & Kurniawan (2022) yang menyatakan bahwa peran aktif pemerintah desa dan pendamping program berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial. Mozin & Pakaya (n.d.) juga menunjukkan bahwa kendala dalam sosialisasi dan komunikasi program mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap implementasi Program Sembako.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran program merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program kebijakan publik. Aspek ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu secara normatif telah mengacu pada kriteria yang ditetapkan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme verifikasi sosial ekonomi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, yang ditandai dengan adanya masyarakat layak yang belum menerima bantuan serta sebagian kecil penerima yang kondisi ekonominya telah meningkat tetapi masih terdaftar sebagai penerima. Permasalahan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas dan pembaruan data, kendala administrasi kependudukan, penggunaan data yang belum sepenuhnya mutakhir, serta terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam proses penetapan akhir penerima. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program sembako dari aspek ketepatan sasaran sangat ditentukan oleh akurasi, pembaruan, dan koordinasi pendataan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ilosa & Nurjana (2022) menyatakan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial sering disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses validasi data. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Salamah dan Kurniawan (2022) yang menyimpulkan bahwa peran aktif pemerintah desa dan pendamping program berpengaruh signifikan terhadap akurasi penetapan keluarga penerima manfaat.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam setiap proses, sebuah program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ketepatan waktu penyaluran program sembako di Desa Tapadaka Satu secara administratif telah dirancang sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan efektif. Keterlambatan pencairan yang masih sering terjadi, meskipun umumnya dalam bentuk perapelan dua atau tiga bulan, menunjukkan adanya kendala dalam sistem penyaluran terpusat, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan administrasi. Dampak keterlambatan penyaluran program sembako ini mengakibatkan sebagian kecil masyarakat harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, yang artinya program ini sudah menciptakan permasalahan baru terhadap penerima manfaat. Maka dari itu, diperlukan peningkatan sinkronisasi dan penguatan sistem penyaluran agar bantuan dapat diterima tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat (Sulila, 2008).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmadani dkk., 2024) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu penyaluran bantuan pangan masih menjadi kendala akibat mekanisme administratif dan proses pencairan dari pusat. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Ilosa & Nurjana (2022) juga menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Program Sembako dipengaruhi oleh sistem penyaluran terpusat dan koordinasi antar lembaga.

Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dalam hal ini program sembako merupakan aspek utama dalam menilai efektivitas suatu program kebijakan publik. Pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu secara umum telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu meringankan beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga memberikan rasa aman terhadap ketersediaan pangan dan memperkuat perlindungan sosial rumah tangga miskin. Namun, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan masih dipengaruhi oleh ketepatan pemanfaatan dana oleh penerima serta ketepatan waktu pencairan bantuan, yang menciptakan permasalahan baru pada penerima manfaat. Dengan demikian, temuan penelitian

ini menunjukkan bahwa meskipun program sembako efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, optimalisasi pengawasan, edukasi, koordinasi, dan perbaikan mekanisme penyaluran masih diperlukan agar tujuan program dapat terealisasi secara maksimal dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Ernawati (2024) yang menyimpulkan bahwa program sembako pada dasarnya telah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan aspek yang mengukur sejauh mana suatu program mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran setelah program tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu telah menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam hal peningkatan keterjaminan pemenuhan kebutuhan pangan dan berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga. Program ini mampu memberikan rasa aman terhadap konsumsi dasar serta membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka pendek. Namun demikian, perubahan yang terjadi masih terbatas pada aspek konsumsi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, pendapatan, maupun perubahan status sosial penerima secara menyeluruh. Selain itu, keterlambatan penyaluran bantuan turut memengaruhi tingkat perubahan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program sembako efektif dalam menciptakan perubahan pada kebutuhan dasar, tetapi belum sepenuhnya mendorong perubahan sosial ekonomi yang bersifat lebih luas dan berkelanjutan.

Temuan ini diperkuat dengan penelitian oleh Ernawati (2024) yang menyatakan bahwa Program Sembako memberikan dampak positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin, meskipun perubahan kesejahteraan yang dihasilkan masih terbatas pada aspek konsumsi. Penelitian Rahman & others (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako telah memberikan manfaat nyata bagi penerima, namun dampaknya belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Program Sembako di Desa Tapadaka Satu merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Tapadaka Satu Kecamatan Dumoga Tenggara, dapat disimpulkan bahwa program ini tergolong cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh indikator pelaksanaannya. Efektivitas program tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur, tetapi juga dari sejauh mana program mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Tapadaka Satu yaitu sebagai berikut : pertama, terkait penguatan sosialisasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan dan penguatan pemahaman terkait tujuan, manfaat, dan mekanisme lebih sistematis, khususnya terkait mekanisme pembaruan data, prosedur pengaduan, serta hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat. Kedua, terkait mekanisme pemutakhiran data yang lebih responsif, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu diberi peran yang lebih aktif dalam proses verifikasi dan validasi data agar pembaruan DTKS tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketiga, terkait ketepatan waktu penyaluran bantuan, keterlambatan penyaluran bantuan berdampak langsung pada stabilitas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sistem monitoring antar level pemerintahan serta pihak penyalur, sehingga jadwal pencairan dapat lebih terjamin dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan. Keempat, terkait penguatan sistem monitoring dan evaluasi program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlu diarahkan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada kerecapaian tujuan dari program sembako yang ada di Desa Tapadaka Satu. Monitoring program sembako secara berkala akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan serta melakukan perbaikan kebijakan secara tepat. Kelima, terkait integrasi program sembako dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi, mengingat implikasi program masih bersifat jangka pendek dan konsumtif, maka diperlukan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergitas sangat diperlukan sehingga bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai

langkah transformatif menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan. Keenam, terkait keterlibatan UMKM desa dalam pelaksanaan program sembako, pemerintah desa dan pihak terkait perlu melibatkan pelaku UMKM yang ada di desa dalam pelaksanaan program sembako, khususnya sebagai penyedia bahan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Keterlibatan UMKM lokal dapat memberikan implikasi ganda, yaitu membantu kelancaran distribusi bantuan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, program sembako tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tergolong kurang mampu, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ernawati, M. (2024). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako di Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Ambakiang dan Desa Piyait). *Journal Pelayanan Publik*, 761–771.
- Ferda, Sarah, dan Marlien, M. (2012). Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan Siau Barat Selatan. *Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), Register zu den Bänden 31-40, Teil 2: Künstlerische Berufe, 1*, 111–112. <https://doi.org/10.1515/9783110941852.111b>
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik : Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Ilosa, A., & Nurjana, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 1(2), 19–26. <https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem>
- Mozin, S. Y., & Pakaya, R. (n.d.). Dinamika Kreatif Manajemen Strategis PLATFORM MEMBACA ONLINE BAGI PELAJAR DAN Dinamika Kreatif Manajemen Strategis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (atau jurnal terkait)*, 07(2), 215–223.
- Pinontoan, M. (2020). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. PT Nasya Expanding.
- Rahmadani, R., Putri, F. A., & Nurhayati, D. (2024). Pengaruh remunerasi terhadap motivasi kerja pegawai rumah sakit: Literatur review. *Jurnal Medika Nusantara*, 2(4), 102–111. <https://doi.org/10.59680/medika.v2i4.1518>
- Rahmadi, A. N., & Wahyuni, R. U. (2021). Efektivitas Program Walk Thru Pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(2), 24. <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i2.7993>
- Rahman, A., & others. (2024). Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulugalung Bantaeng. *Jurnal Terkait*, 3, 159–168.

Salamah, S., & Kurniawan, B. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *Publika*, 19, 819–834. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p819-834>

Sembako, P. (2020). Pedoman Umum Program Sembako. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9(2), 187–205.

Sulila, I. (2008). Audit Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Inovasi*, 5, 69–73.

Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. PRENADAMEDIA GROUP.

Tahir, A. (2022). *Administrasi Publik: Good Governance menuju Sound Government*.